INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

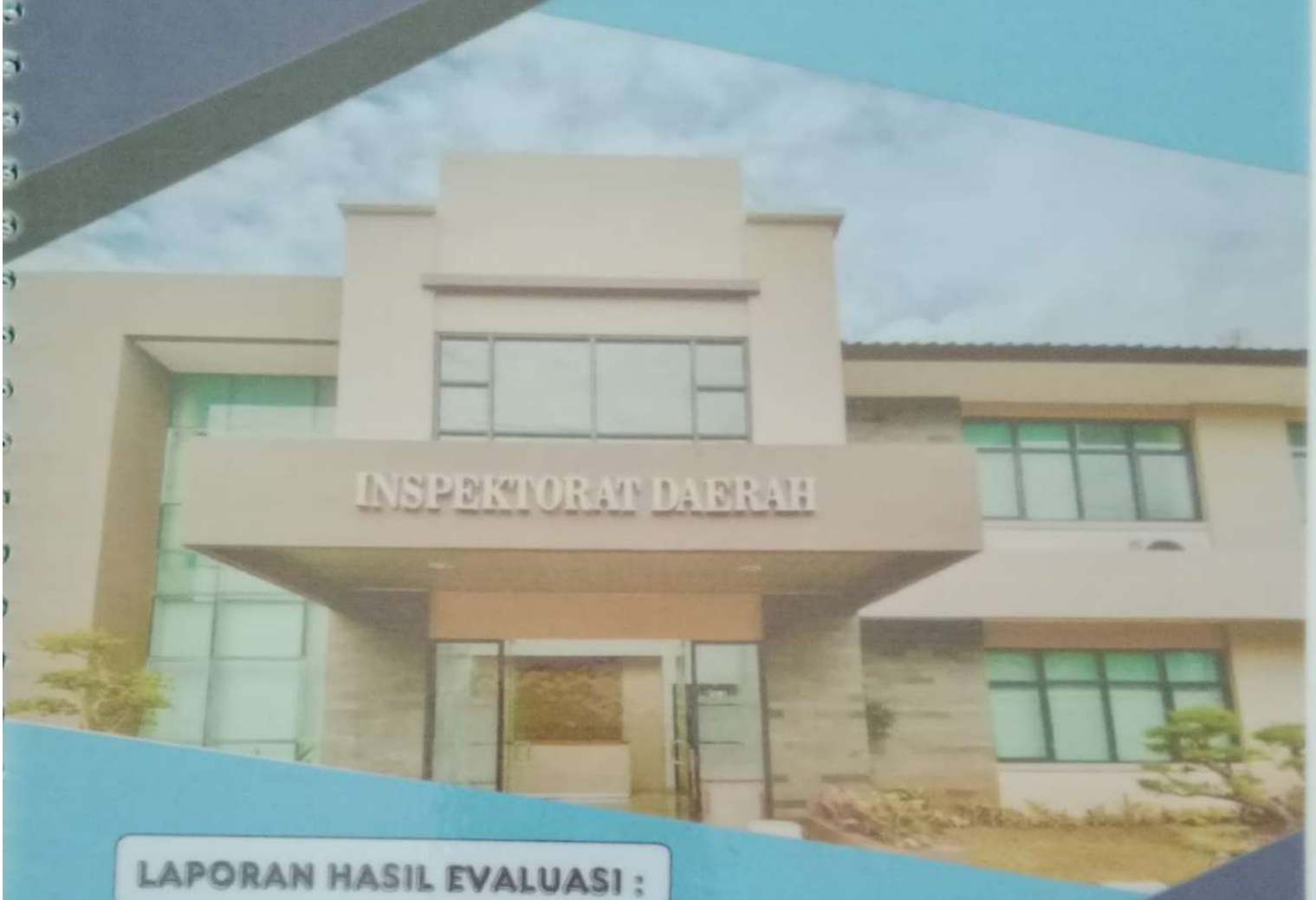

LAPORAN HASIL EVALUASI :

Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Nomor : PW.02.02/ 491/ Inspt-Irban II/ 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025.
- Renja TA.2022 dan Renja Perubahan 2022 yang mengacu ke RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2022
- SOP Renstra Tahun 2022
- SOP Renja Tahun 2022
- SOP RKA 2022
- SOP/ Pedoman Perencanaan kinerja
- Perencanaan aktivitas yang mendukung Kinerja (Rencana Aksi Kinerja)

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan 11 (sebelas) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,10 (Delapan koma satu nol) dari bobot 9.00 dengan gradasi nilai A, hal tersebut dapat di lihat dari dokumen.

- Renstra dan Renja telah diformalkan dengan Keputusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
- Renstra dan Renja telah dipublikasikan di Website Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- SKP 2022
- Renstra dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.
- Crosscuting program Kegiatan Tahun anggaran 2022
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : PW.02.02/ 493 /Inspt-Irban II/ 2023 31 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta.
Di
Purwakarta

Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/314/Inspt/2023 tanggal 28 Februari 2023 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Sekretariat Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kecamatan Campaka dan Kecamatan Cibatu.

Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir.

Demikian, agar dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.

INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :
1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : PW.02.02/493 /Inspt-Irban II/2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah di Implementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan hasil Evaluasi yaitu sebesar 82,00 (Delapan puluh dua koma nol-nol) rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 22,80 (Dua puluh dua koma delapan nol), Pengukuran Kinerja sebesar 25,20 (Dua puluh lima koma dua nol), Pelaporan Kinerja sebesar 13,50 (Tiga belas koma lima nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,50 (Dua puluh koma lima nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **A Sangat baik** Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan Implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/314/Inspt/2023 tanggal 28 Februari 2023 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Sekretariat Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kecamatan Campaka dan Kecamatan Cibatu.

b. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, Alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat Sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian Kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. **Tujuan Evaluasi:**

1. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil Evaluasi periode sebelumnya.

d. **Ruang Lingkup Evaluasi**

1. Penilaian kualitasi Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mecapai Kinerja berikutnya;
4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi Kinerja.

e. **Metodoloogi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi SAKIP yang digunakan adalah Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi

f. **Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta**

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pealporan penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

a. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari Penyusunan Dokumen Perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2022 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai Pengukuran Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

b. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya**

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022.

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam mancapai keberhasilan indikator kinerja telah membuat Inovasi adapun inovasi adalah sebagai berikut :

a) Inovasi pelayanan KB bergerak ke pelosok-pelosok Desa/ Kelurahan untuk mempermudah Akses Pelayanan KB tujuan nya adalah untuk meningkatkan cakupan pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif.
b) Inovasi melakuan kerjasama Praktek Bidan Mandiri (PMB) untuk pelayanan KB tujuannya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan KB.
c) Inovasi sosialisasi di media sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi mantap tujuannya untuk meningkatnya cakupan pengguna alat kontrasepsi mantap.
d) Inovasi melakukan pelayanan KB MKJP secara serentak di kegiatan Gempungan dan momentum tujuan nya untuk meningkatkan keikutsertaan ber KB menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.
e) Inovasi melakukan pembinaan terhadap peserta KB Aktif tujuannya untuk mengurangi angka Drop out peserta KB.
f) Inovasi Bekerjasama dengan Bidang- bidang terkait untuk mempercepat proses pelaporan di Aplikasi NEWSIGA tujuannya untuk pelaporan yang cepat di harapkan droping alkon ke setiap klinik dapat dilaksanakan di awal Bulan .
g) Memberikan pelatihan penyuluhan program Bangga Kencana dan teknik KIE kepada kader IMP di setiap UPTD KB tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kader IMP terhadap Program Bangga Kencana dan Teknik KIE

kepada masyarakat

h) Penggunaan Aplikasi AMBU KEREN untuk merekap seluruh kegiatan di lapangan tujuan nya untuk mempermudah proses Evaluasi program di setiap Kecamatan.

i) Menambah petugas lapangan PLKB non PNS untuk mempercepat penyampaian program bangga kencana , tujuannya untuk kesesuaian arahan kebijakan pemerintah Daerah 1 petugas 1 Desa/kelurahan .

j) Aplikasi pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK21) tujuannya untuk mendata kepada keluarga kaitan dengan Program Bangga Kencana.

Selain ada beberapa inovasi yang telah diimpelmentasikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021 mendapatkan:

a) Penghargaan apresiasi ke-3 terbaik dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas pengelolaan pendataan keluarga tahun 2022 untuk kategori KK kurang dari 500.000 KK.

b) Penghargaan terbaik 5 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru MKJP lebih dari 100% Tahun 2022 ,

c) Penghargaa terbaik 4 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru MOP lebih dari 100% Tahun 2022.

d) Penghargaan terbaik 1 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru lebih dari 100% tahun 2022.

Sehingga hasil penilaian SAKIP Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 22,80 (Dua puluh dua koma delapan nol) 70 % dari bobot 30, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4.20 (Empat koma dua nol) dari bobot 6,00 dengan gradasi nilai B, Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia:

sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
- Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- Bukti screenshoot publikasi perencanaan.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Evaluasi atas Sub Komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan 8 (Delapan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,50 (Sepuluh koma lima nol) dari bobot 15,00 dengan gradasi nilai B yang telah terpenuhi yaitu:

- Laporan realisasi capaian sub kegiatan ,kegiatan program per triwulan TA 2022
- Laporan Evaluasi dan Monitoring Program kegiatan dan Sub Kegitan TA 2022
- Laporan Realisasi Anggaran 2022.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 25,20 (Dua puluh lima koma dua nol) 84 % dari bobot 30, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,6 (Tiga koma enam) dari bobot 6,00 dengan gradasi nilai CC, hal tersebut dikarenakan dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah dibuatkan SOP

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Nomor: 900/10/I/DPPKB/2022 tanggal 4 Januari 2022 serta adanya Matrik inovasi yang mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

2.b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efekti dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,1 (Delapan koma satu) dari bobot 9,00 dengan gradasi nilai A, yaitu

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja;
- Data kinerja yang telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan dibuatkan laporan capaian sub kegiatan dan program per triwulan dan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yang ada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta yaitu SIP.
- Laporan realisasi capaian Sub Kegiatan ,kegiatan program pertriwulan 2022
- Laporan Realisasi Fisik dan keuangan bulan Desember 2022
- Pengukuran kinerja Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022.
- Matrik inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh Kepala dinas.
- Notulen Rapat Evaluasi Kinerja di tandatangani langsung Kepala Dinas.

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan 10 (sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 13,5 (Tiga belas koma lima) dari bobot 15,00 dengan gradasi nilai A Dalam pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Laporan Kinerja Pegawai bulanan dan Indikator Kinerja Individu, akan tetapi pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam hal penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional serta penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 13,50 (Tiga belas koma lima nol) 90 % dari bobot 15, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Evaluasi atas Sub Komponen Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,7 (Dua koma empat) dari bobot 3,00 dengan gradasi nilai A Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja telah disusun yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Nomor : SK / 476/Kep. DPPKB/2022 Dan telah ada bukti bahwa laporan kinerja tersebut telah direviu dan dipublikasikan.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,05

(Empat koma nol lima) dari bobot 4,50 dengan gradasi nilai A. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu tertuang dalam BAB III dan BAB IV LAKIP 2022, akan tetapi dalam LAKIP 2022 belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja telah telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,75 (Enam koma tujuh lima) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai A.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,5 (Dua puluh koma lima) 82 % dari bobot 25, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,5 (Dua koma lima) dari bobot 5.00 sesuai dengan mandat kebijakan dengan gradasi nilai C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan kepada seluruh OPD sesuai dengan SOP .Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Kerja Inspektur perihal evaluasi SAKIP OPD.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,75 (Enam koma tujuh lima) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai A.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas sesuai dengan SOP Akuntabilitas Kinerja Internal dan Sumber Daya yang memadai yang telah mengikuti Pola Pengembangan Mandiri Evaluasi SAKIP, akan tetapi evaluasi akuntabilitas kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akintabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efiktifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efiktifitas dan efisiensi kinerja dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 11,25 (Sebelas koma dua lima) dari bobot 12,50 sesuai dengan mandat kebijakan gradasi nilai A.

b. **Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah agar selalu mengimpelentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan dan terus menerus.

BAB III
PENUTUP

a. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **MEMUASKAN** yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100**	**82,00**
Predikat			**A – Memuaskan**

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten purwakarta beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah di recanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan Inovasi yang di kembangkan terkait perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008